Peristiwa Malari

1. **Krisis Ekonomi 1966 (Hiperinflasi 650%)**

   Pada 1965–1966, krisis ekonomi Indonesia mencapai puncaknya pada masa peralihan pemerintahan **Presiden Soekarno menuju pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto**. Indonesia saat itu menghadapi hiperinflasi sekitar 636–650%, sehingga pemerintah memprioritaskan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Kebijakan tersebut mendorong Indonesia semakin terbuka terhadap investasi asing dan membantu pemulihan serta pertumbuhan ekonomi. Namun, pada awal 1970-an, kebijakan tersebut juga memunculkan kritik terhadap ketergantungan pada modal asing dan dominasi perusahaan asing, khususnya Jepang, yang kemudian **menjadi salah satu latar belakang gerakan mahasiswa** hingga memuncak dalam Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974.



2. **Soeharto Memegang Kekuasaan Eksekutif**

   Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) di tengah situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia yang tidak stabil setelah peristiwa G30S 1965. Saat itu, demonstrasi mahasiswa, konflik politik, serta hiperinflasi dan krisis ekonomi semakin memperberat kondisi negara. **Supersemar memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan pemerintahan.** Setelah memperoleh kewenangan tersebut, posisi Soeharto semakin kuat secara politik dan menjadi salah satu langkah penting menuju perubahan pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.



\

3. **Pengesahan UU PMA No. 1 Tahun 1967**

   Pada 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru mulai **membuka kembali perekonomian Indonesia melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing**. Kebijakan ini bertujuan menarik modal asing dengan memberikan kepastian hukum, kemudahan dalam berinvestasi, serta berbagai fasilitas bagi investor, termasuk tax holiday atau pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan pembangunan nasional.



4. **PembentukanKonsorsiumPinjaman IGGI**

   Pada Februari 1967, Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) dibentuk di Amsterdam ketika kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk setelah krisis ekonomi 1965–1966. IGGI bertujuan memberikan bantuan keuangan, kredit, dan dukungan ekonomi kepada Indonesia untuk mengatasi krisis, memenuhi kewajiban luar negeri, dan memulihkan perekonomian. **Kerja sama dengan negara-negara Barat dan Jepang membuat Indonesia semakin terhubung dengan modal serta bantuan asing**. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang dikritik mahasiswa, terutama terkait meningkatnya pengaruh ekonomi Jepang, dan menjadi salah satu konteks yang melatarbelakangi Peristiwa Malari pada 1974.

5. **Freeport Masuk sebagai Investor Pertama**

Pada April 1967, setelah pemerintah Orde Baru mulai membuka perekonomian Indonesia terhadap modal asing, pemerintah menjalin kerja sama dengan Freeport untuk mengembangkan sektor pertambangan serta menarik modal dan teknologi asing ke Indonesia. **Masuknya Freeport menjadi salah satu contoh awal keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing pada masa Orde Baru.** Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh masuknya lebih banyak perusahaan asing, termasuk dari Jepang. Meningkatnya investasi asing selanjutnya menjadi salah satu hal yang dikritik mahasiswa dalam Peristiwa Malari 1974, terutama terkait kekhawatiran terhadap ketergantungan ekonomi Indonesia pada modal asing.

6. **Kabinet Pembangunan I dibentuk**

Pada 6 Juni 1968, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan I di Jakarta untuk **memulihkan ekonomi dan menjalankan pembangunan**. Kabinet diisi tokoh berdasarkan keahlian dan pengalaman, terutama tenaga teknokrat; Sri Sultan Hamengkubuwono IX menangani koordinasi ekonomi, Ali Wardhana menangani keuangan, dan Widjojo Nitisastro berperan dalam perencanaan pembangunan. Mereka dipilih karena kompetensi teknis dan pengalaman pemerintahan untuk menangani inflasi, keuangan negara, dan pembangunan, bukan sekadar karena kecerdasan.



7. Pelita I Dimulai (1 April 1969)

Pada 1 April 1969, pemerintah Orde Baru memulai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I sebagai program pembangunan lima tahun pertama. Program ini **menitikberatkan pada pembangunan pertanian dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan produksi pangan, pembangunan dan perbaikan irigasi, pembangunan prasarana dan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat**. Pelaksanaan Repelita I mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, tetapi menjelang Peristiwa Malari muncul kritik mengenai ketidakmerataan hasil pembangunan di masyarakat.



8. Perkembangan Investasi dan Industri Jepang

Pada 1968–1973, hubungan ekonomi Jepang dengan Indonesia semakin berkembang. Jepang mulai memberikan pinjaman ODA kepada Indonesia pada 1968, kemudian kerja sama dan investasinya meluas ke berbagai sektor, termasuk industri manufaktur seperti tekstil. Pada 1971, IFC bersama produsen tekstil Jepang turut mendukung pembentukan perusahaan Indonesia–Jepang, seperti PT Unitex dan PT Primatexco. Perkembangan investasi dan kerja sama tersebut menunjukkan semakin **kuatnya keterlibatan Jepang** dalam perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru dan menjadi salah satu latar belakang munculnya kritik terhadap pengaruh modal asing menjelang Peristiwa Malari 1974.

9. Oil Boom dan Ketidakmerataan Pembangunan

Pada 1973, krisis minyak dunia menyebabkan **harga minyak meningkat** dan memberikan tambahan penerimaan bagi negara-negara penghasil minyak, termasuk Indonesia. Peningkatan penerimaan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan negara, muncul kritik mengenai ketidakmerataan pembangunan dan pembagian manfaat ekonomi. Persoalan tersebut menjadi salah satu bagian dari keresahan mahasiswa menjelang Peristiwa Malari 1974

10. Masalah Internal Aspri, Korupsi, dan Kesenjangan

Pada 1974, selain mengkritik masuknya modal asing, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan dalam negeri. Salah satunya adalah besarnya pengaruh Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, terutama **Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani**, dalam pemerintahan. Mahasiswa juga mengkritik praktik **korupsi** serta hubungan antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Selain itu, pembangunan yang meningkat belum dianggap sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat sehingga muncul kritik mengenai kesenjangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari tuntutan dan keresahan mahasiswa menjelang Peristiwa Malari pada Januari 1974.

11. Tritura 1974

Pada Januari 1974, mahasiswa menyuarakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) 1974 sebagai bentuk kritik terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan. Tuntutan tersebut meliputi penurunan harga, pembubaran Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, serta pemberantasan korupsi. Ketiga tuntutan ini menunjukkan bahwa kritik mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal dan pengaruh ekonomi Jepang, tetapi juga ditujukan pada persoalan ekonomi, korupsi, dan pemerintahan di dalam negeri.



12. Kedatangan PM Kakuei Tanaka ke Jakarta

Pada 14 – 17 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto pada 15 Januari 1974. Kunjungan tersebut berlangsung ketika kritik terhadap modal asing dan meningkatnya pengaruh ekonomi Jepang di Indonesia sedang berkembang. Kedatangan Tanaka **kemudian menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menggelar demonstrasi sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan ekonomi, investasi asing, dan persoalan dalam negeri.**



13. Demonstrasi Mahasiswa dan Peristiwa Malari

Pada 15 Januari 1974, mahasiswa menggelar demonstrasi di Jakarta bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, antara lain penurunan harga, pembubaran Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, pemberantasan korupsi, serta kritik terhadap masuknya **modal asing.** Aksi yang pada awalnya berupa demonstrasi kemudian berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah wilayah Jakarta. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974.



14. Setelah Malari Penangkapan, Pembatasan Pers, dan Perubahan Politik

Pada Januari 1974 dan setelahnya, pemerintah mengambil berbagai tindakan terhadap gerakan mahasiswa dan pihak-pihak yang dianggap terkait dengan Peristiwa Malari. Sejumlah **aktivis mahasiswa ditangkap, sementara beberapa media massa diberedel atau dibatasi pemberitaannya. Pemerintah juga membubarkan Asisten Pribadi (Aspri) Presiden dan mencopot Soemitro dari jabatan Pangkopkamtib**. Selain itu, pengawasan terhadap gerakan mahasiswa semakin diperketat. Salah satu sumber mencatat bahwa sekitar 775 aktivis ditangkap, sedangkan beberapa media massa diberedel setelah Peristiwa Malari.



15. NKK/BKK

Pada 1978 – 1979, pemerintah menerapkan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Secara resmi, kebijakan ini bertujuan menata kehidupan kampus dan mengarahkan mahasiswa pada kegiatan akademik. Dalam perkembangannya, NKK/BKK membatasi aktivitas politik mahasiswa di lingkungan kampus dan memperketat ruang gerak organisasi kemahasiswaan.



DAFTAR PUSTAKA

Antara Foto. (n.d.). *MALARI 1974* [Koleksi foto]. Antara Foto. https://www.antarafoto.com/id/jelajah?photographer=&editor=&q=MALARI+1974&start_year=&end_year=&sort=date-desc

Indonesiana. (2025, 24 April). *Strategi Orde Baru membungkam gerakan mahasiswa di kampus*. https://www.indonesiana.id/read/182006/strategi-orde-baru-membungkam-gerakan-mahasiswa-di-kampus

JPNN. (n.d.). *Oh, dari sini toh modal awal Freeport masuk ke Indonesia*. JPNN.com. https://www.jpnn.com/news/oh-dari-sini-toh-modal-awal-freeport-masuk-ke-indonesia

Kompas.com. (2021, 1 Oktober). *Korban tragedi 1965, mantan tahanan politik, bukan tahanan kriminal*. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/20474241/korban-tragedi-1965-mantan-tahanan-politik-bukan-tahanan-kriminal

Media Indonesia. (2024, 10 Januari). *Hari Tritura 10 Januari: Sejarah dan isi*. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/643200/hari-tritura-10-januari-sejarah-dan-isi

Republika.id. (2024, 15 Januari). *Konteks Malari: Protes mahasiswa hingga keresahan umat*. https://www.republika.id/posts/49666/konteks-malari-protes-mahasiswa-hingga-keresahan-umat

Tempo Data. (2014, 14 Oktober). *Peristiwa Malari di kawasan Monas Jakarta* [Foto]. https://data.tempo.co/foto/detail/P1410201400049/peristiwa-malari-di-kawasan-monas-jakarta

Tempo Data. (2022, 14 Januari). *Presiden Soeharto menerima kunjungan PM Kakuei Tanaka* [Foto]. https://data.tempo.co/foto/detail/P1401202285273/presiden-soeharto-menerima-kunjungan-pm-kakuei-tanaka

Universitas Gadjah Mada. (n.d.). *Soeharto kembali diusulkan jadi pahlawan nasional, ini tanggapan sejarawan UGM*. UGM. https://ugm.ac.id/id/berita/soeharto-kembali-diusulkan-jadi-pahlawan-nasional-ini-tanggapan-sejarawan-ugm/

VOI. (2022, 19 April). *Sejarah hari ini (19 April 1978): Kebebasan kampus diberangus Orde Baru lewat NKK/BKK*. https://voi.id/memori/159055/sejarah-hari-ini-19-april-1978-kebebasan-kampus-diberangus-orde-baru-lewat-nkk-bkk